

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari analisa yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa format Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta belum sesuai dengan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun, dari segi isi sudah mencerminkan tentang pertanggungjawaban kinerja. Walaupun dari segi format belum sesuai tetapi dari segi isi secara informasi LAKIP yang telah disusun dapat digunakan untuk pembuatan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

5.2 Implikasi

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta sehingga di tahun yang akan datang Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan format LAKIP yang ada dalam Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta diharapkan sesuai

dengan format LAKIP agar LAKIP dapat lebih berguna sebagai umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maka bentuk dan isinya diseragamkan tanpa mengabaikan keunikan masing-masing instansi pemerintah. Format LAKIP ini dimaksudkan untuk mengurangi perbedaan isi dan cara penyajian yang dimuat dalam LAKIP sehingga memudahkan perbandingan ataupun evaluasi akuntabilitas yang harus dilakukan.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tri Hartono, peneliti memperoleh informasi bahwa penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Pelayanan Pajak Daerah dibuat berdasarkan pada blanko yang didapat setiap bulan Desember dari Tata Pemerintahan dan pembuatan LAKIP ini dibuat oleh 2 orang yaitu untuk uraian dibuat oleh Bu Andewi dan untuk bagian lampiran dibuat oleh Pak Tri Hartono. Walaupun belum sesuai dengan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Tata Pemerintahan tidak pernah mengembalikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta yang telah dibuat sehingga Kantor Pelayanan Pajak Daerah tidak mengetahui jika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Pelayanan Pajak Daerah belum sesuai dengan

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peneliti menyarankan sebaiknya Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta mempunyai sendiri Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tidak hanya blanko dari Tata Pemerintahan dan Tata Pemerintahan harus teliti dalam memeriksa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sehingga jika ada kekurangan dikembalikan lagi kepada instansi pemerintahan yang bersangkutan.

Saran yang lain peneliti dapat berikan adalah :

- a. Hasil dari penyajian LAKIP hendaknya disosialisasikan lagi sehingga satu dengan yang lain tidak mengartikannya secara berbeda-beda.
- b. Dalam penyajian LAKIP perlu ditambahkan uraian tentang Ikhtisar Eksekutif , gambaran umum mengenai : Rencana stratejik dan Rencana Kerja serta uraian tentang Rencana Kerja.
- c. Dalam lampiran perlu ditambahkan Laporan Rencana Kinerja Tahunan dan lampiran perlu dibuat daftar lampiran sehingga dalam mencari lampiran yang ingin dilihat menjadi lebih mudah.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.(1999). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta.

<http://www.mabesad.mil.id/artikel/artikel2/310504lakip2.htm> diakses tanggal 17 September 2006.

<http://www.semarang.go.id/pemerintah/lembaga/Bappeda/evaluasi.htm> diakses tanggal 28 September 2005.

Jaeni.(2003,April). *Reformasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk Menciptakan Mekanisme Good Governance*. Fokus Ekonomi, 2(1),57-69.

Jogiyanto.(2004). *Metodologi Penelitian Bisnis*. BPFE UGM. Yogyakarta.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.(2003). *Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta.

Mardiasmo.(2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset. Yogyakarta.

Walikota Yogyakarta.(2005).*Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Pajak Daerah*. Yogyakarta.

Walikota Yogyakarta.(2005).*Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 196 Tahun 2005 Tentang Penjabaran Fungsi Dan Tugas Kantor Pelayanan Pajak Daerah*. Yogyakarta.

Suandy, Erly.(2002). *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.

Tiyono.(2002,September). *Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 1(2), 139-152.

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. (1999).*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta.

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.(1999).*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah..* Jakarta.

Waluyo.(2006).*Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.

Witono,Bono.(2002,April).*Akuntabilitas Sektor Publik dan Akuntabilitas Keuangan Daerah*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 1(1), 12-23.





LAMPIRAN

Lampiran 1

Tabel Penetapan Kinerja
Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta

No	Program Utama	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran		Indikator Kinerja Output		Indikator Kinerja Outcome		Anggaran
			Uraian	Target	Uraian	Target	Uraian	Target	
1.	Peningkatan pelayanan internal	1. Menyelenggarakan pelayanan umum (antara lain melaksanakan pengadaan barang)	Menyelenggarakan bahan habis pakai kantor.	42,167,850	Tersedianya kebutuhan kantor, alat listrik, ATK, biaya perangko, materai dan benda pos, serta tabung pemadam.	42,167,850	100%	42,167,850	
			Penyelenggaraan jasa kantor	12,650,000	Telepon, surat kabar Pegawai Non PNS Dokumentasi dan Dekorasi	12,650,000	100%	12,650,000	
			Menyelenggarakan makan dan minum	15,730,000	Terlaksananya pelayanan makan, minum karyawan	15,730,000	11 bulan	15,730,000	
			Penyelenggaraan perjalanan dinas	1,500,000	Terlaksananya perjalanan dinas	1,500,000	40 orang	1,500,000	

				131,280,680	131,280,680	12 bulan	131,280,680
	Menyelenggarakan pemeliharaan bangunan, gedung, alat angkut, alat kantor, alat studio dan komunikasi	Menyelenggarakan pemeliharaan bangunan, gedung, alat angkut, alat kantor, alat studio dan komunikasi	Terlaksananya pemeliharaan bangunan, gedung, alat angkut, alat kantor, alat studio dan komunikasi	121,996,080	121,996,080	Terawatnya peralatan kantor	12 bulan
	Menyelenggarakan cetak dan pengadaan keperluan kantor	Menyelenggarakan cetak dan pengadaan keperluan kantor	Terselenggaranya cetak dan pengadaan keperluan kantor	16,500,000	16,500,000	Tersedianya dokumen, perencanaan dan pelaporan	12 bulan
2. Menyelenggarakan pelayanan kepegawaian	Penyelenggaraan pengembangan SDM	Penyelenggaraan pengembangan SDM	Terkirimnya Pegawai yang mengikuti diklat diklat	17,500,000	17,500,000	Peningkatan keahlian SDM meningkat	5 orang
3. Menyelenggarakan pelayanan keuangan	Terlaksananya kebutuhan dana 4 seksi dan 1 sub Bag. TU dalam mendukung tugas pokok dan fungsi kantor	Terlaksananya kebutuhan dana 4 seksi dan 1 sub Bag. TU dalam mendukung tugas pokok dan fungsi kantor	Terlayani 4 Seksi dan 1 sub Bag. TU dalam mendukung tugas pokok dan fungsi kantor	4,197,858,369	4,197,858,369	Tercukupinya kebutuhan dalam menjalankan Tupoksi	12 bulan
4. Menyusun dokumen	Terlaksananya penyusunan dokumen - laporan bulan - program - mekanisme	Terlaksananya penyusunan dokumen - laporan bulan - program - mekanisme	Tersedianya dokumen, perencanaan dan pelaporan	12 bulan	12 bulan	Adanya dokumentasi pelaporan	12 bulan

2.	Penyusunan Pedoman Pemungutan Pajak Daerah	1. Mengevaluasi dan menyusun materi penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah 2. Mengevaluasi dan menyusun materi penyempurnaan Rancangan Keputusan Walikota 3. Mengevaluasi Sisduur pemungutan Pajak Daerah	laporan Pengg. Angg Tersusunnya Perda	2 buah 3 buah 1 sisduur	Rancangan draft Perda Draft Keputusan WK tentang Juklak Pajak Penyempurnaan Sisduur Pajak Daerah	2 buah 3 buah 1 sisduur	Adanya Perda Adanya keputusan WK tentang juklak pajak Adanya petunjuk Sisduur Pajak Daerah	3 buah 3 buah 1 buah					
3.	Peningkatan Pajak Daerah dan Bagi Hasil PBB dan BPHTB	1. Optimalisasi Pajak Hotel dan restoran 2. Optimalisasi Pajak Hiburan	Terlaksanaan Angg Tersusunnya Perda	723 WP 5064 SKPD 144,200,000 79 WP 948SKPD	Tercapainya Pajak Hotel dan Pajak Restoran Tercapainya Pajak Hiburan	25,250,000 1,678,000,000	Meningkatnya Pajak Hotel dan Pajak Restoran Meningkatnya Pajak Hiburan	17,44% 4,81%	476,398,000 195,790,000				

						5,349,000				
						79 WP	- Tertagihnya tunggakan - Terpantaunya Pemungutan Pajak Hiburan - Terperiksanya WP			
						30 WP				
						6500 WP	Terlaksananya kegiatan - Terjarungnya dan terdatanya wajib pajak - Terkirimnya SKPD			
						3400 SKPD	- Tertagihnya Tunggakan WP Reklame			
						13,000,000				
						6500 WP	- Terpantaunya monitoring pajak reklame			
						103 WP	Terlaksananya kegiatan - Terjarungnya dan terdatanya WP			
						1236 SKPD	- Terkirimnya SKPD Pajak Parkir			
						1,500,000	- Tertagihnya tunggakan WP Parkir			
						103 WP	- Terpantaunya Pemungutan Pajak			
3. Optimalisasi Pajak Reklame	Tercapainya pajak reklame	2,257,000,000	Meningkatnya Pajak Reklame	5,33%	263,301,000					
4. Optimalisasi Pajak Parkir	Tercapainya Pajak Parkir	280,000,000	Meningkatnya Pajak Parkir		91,425,000					

					91.666 WP	Tercapainya realisasi penyeteroran PPJ	13,900,000,000	Meningkatnya penerimaan PPJ	1,167,000,000	72,605,000
	5. Optimalisasi Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	Terlaksananya kegiatan	Terlaksananya kegiatan	83950WP	83950WP	Tercapainya PBB Tercapainya BPHTB	24,550,000,000	Meningkatnya Pajak PBB dan BPHTB	10,32%	376,805,000
	6. Optimalisasi Pajak PBB dan BPHTB	- Terpeliharanya akurasi data	- Tersampainya SPPT	2,000,000,000	13,168,000,000					
	7. Pendataan dan Peningkatan Pajak Hotel dan Pajak Restoran	- Terlaksananya pendataan dan pemeriksaan wajib pajak Hotel dan pajak Restoran	- Terlaksananya pendididkan dan pelatihan aparat pemeriksa pajak	100 WP	30 orang	Tercapainya Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran	25,250,000,000	Meningkatnya Pajak Hotel dan Pajak Restora	17,44%	1,627,238,403
3.	Peningkatan ketertiban ketaatan dan kesadaran wajib pajak	1. Pembinaan, Penyuluhan dan Pemberian Penghargaan WP	Terbinanya Wajib Pajak Daerah Terselenggaranya penyuluhan wajib pajak	1000 WP	2250 WP	Meningkatnya kesadaran dan ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak	6,624,188,000	Meningkatnya pajak daerah	11,45%	134,188,000

	2. Pengadaan barang	Terlaksananya kegiatan barang cetak Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan - Jas hujan - Tas Kerja - Kaos Kerja - bahan pakaian dinas harian	42 jenis 130 buah 50 buah 50 potong 220 potong	Terpenuhiya barang cetak, terpenuhiya pakaian kerja lapangan - Jas hujan - Tas Kerja - Kaos Kerja - bahan pakaian dinas harian	42 jenis 130 buah 50 buah 50 potong 220 potong	Meningkatnya pelayanan terhadap wajib pajak	100%	159,040,000
--	---------------------	---	--	--	--	---	------	-------------



Lampiran 2
Tabel Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)
Tahun 2005

Instansi : Kantor Pelayanan Pajak Daerah
S/d Triwulan : Empat

		Kegiatan						
Program	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian Target	Ket.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Peningkatan Pajak Daerah dan bagi hasil PBB dan BPHTB	1. Optimalisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran	Dana SDM Sarana dan Prasarana	Rp SDM Unit	476,398,000 233 3	414,855,075	87,08		
		Terpantainya pemungutan Pajak Hotel dan hasil Restoran Terkirimnya SKPD Pajak Hotel dan hasil Restoran Tertagihnya tunggakan WP Hotel dan Pajak Restoran	WP	723	723	100.00		
			SKPD	5,064	5,064	100.00		
			Rp WP	144,200,000	666,388,930	462.13		

	Outcomes	Tercapainya Optimalisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran	Rp	25,250,000,000	26,526,900,591	105.06
2. Optimalisasi Pajak Hiburan	Input	Dana	Rp	195,790,000	178,891,825	91.37
		SDM	SDM	105	105	100.00
		Sarana dan Prasarana	Unit	3	3	100.00
	Output	Terlaksananya kegiatan	Kegiatan			
		-Terjaringnya / Terdatanya WP	WP/12 Bln	948	893	94.20
		- Terkirimmnya SKPD	SKPD	948	916	96.62
		- Tertagihnya tunggakan	Rp	5,349,000	5,733,580	107.19
		- Terpantaunya Pemungutan Pajak Hiburan	WP	948	893	94.20
		- Terperiksanya WP	Wp	30	35	116.67
	Outcome	Tercapainya Optimalisasi Pajak Hiburan	Rp	1,678,000,000	1,700,183,896	101.32
3. Optimalisasi Pajak Reklame	Input	Dana	Rp	271,956,000	219,836,080	80.84
		SDM	SDM	110	110	100.00
		Prasarana	Unit	3	3	100.00

		Output	Terlaksananya kegiatan - Pendataan Reklame - Proses Perijinan Reklame - Terjualnya Titik Reklame - Terjarangnya dan terdatanya wajib pajak - Terkirinya SKPD - Tertagihnya Tunggakan WP Reklame - Terpantaunya monitoring pajak reklame	Kegiatan WP WP Titik WP SKPD Rp WP Rp	2,000 3,400 50 4,500 3,400 13,000,000 4,500 2,257,000,000	535 3,032 6 6,300 6,300 10,021,351 6,300 2,437,630,464	26.75 89.18 12.00 140.00 185.29 77.09 140.00 108.00	
	4. Optimalisasi Pajak Parkir	Input	Dana SDM Sarana dan Prasarana	Rp SDM Unit	91,425,000 76 3	84,147,100 75 3	92.04 98.68 100.00	
		Output	Terlaksananya kegiatan - Terjarangnya dan terdatanya WP Pajak Parkir - Tertagihnya tunggakan WP Parkir	Kegiatan WP/ 12bulan SKPD/ 12bulan Rp	1,236 1,236 1,500,000	1,244 1,244 5,177,916	100.65 100.65 345.19	

					WP/ 12 bulan	1,236	1,244	100.65
			- Terpantaunya Pemungutan Pajak					
	Outcome		Tercapainya optimalisasi Pajak Parkir	Rp		280,000,000	281,963,470	100.70
	Input	5. Optimalisasi Pajak Penerangan Jalan	Dana SDM Sarana dan Prasarana	Rp SDM Unit		72,605,000 59 3	68,925,350 59 3	94.93 100.00 100.00
	Output		Terpantaunya Penyetoran PPJ	WP		91,666	86,589	94.46
	Outcome		Tercapainya Optimalisasi Realisasi Penyetoran PPJ	Rp		13,900,000	15,159,696,951	109.06
	Input	6. Optimalisasi Pajak PBB dan BPHTB	Dana SDM Sarana dan Prasarana	Rp SDM Unit		376,805,000 267 3	371,314,725 267 3	98.54 100.00 100.00
	Output		Terlaksananya kegiatan - Terpeliharanya akurasi data - Tersampainya SPPT - Tertagihnya tunggakan PBB - Terpantaunya pemungutan PBB - Terlaksananya koordinasi pemantauan BPHTB	Kegiatan WP WP Rp Rp Kegiatan		83,950 83,950 2,000,000,000 13,168,000,000 2	84,083 84,083 1,271,190,857 19,229,064,927 2	100.16 100.16 63.56 146.03 100.00

	Outcome	Tercapainya realisasi PBB dan BPHTB	Rp	24,550,000,000	30,505,632,717	124.26
	Input	Dana SDM Sarana dan Prasarana	Rp SDM Unit	1,627,238,403 32 3	1,623,911,703 32 3	99.80 100.00 100.00
	Output	Pendataan dan pemeriksaan wajib pajak Hotel dan pajak Restoran Terdidiknya aparat pemeriksa pajak	WP Org	100 30	100	100.00 100.00
	Outcome	Tercapainya penerimaan pajak hotel dan pajak restoran	Rp	25,250,000,000	26,526,900,591	105.06
Peningkatan ketertiban ketaatan dan kesadaran wajib pajak	Input	Dana SDM Sarana dan Prasarana	Rp SDM Unit	159,040,000 20 3	147,798,500 20 3	92.93 100.00 100.00
	Output	Pengadaan barang cetakan	Jenis	42	41	97.62
	Outcomes	Tersedianya barang cetakan Tersedianya Pakaian Kerja Lapangan - Jas hujan - Tas Kerja - Kaos Kerja Tersedianya bahan pakaian dinas harian	Jenis Bh Bh Potong Stel	42 130 50 50 220	41 130 50 50 202	97.62 100.00 100.00 100.00 91.82

	2. Pembinaan, Penyuluhan dan Pemberian Penghargaan WP	Input	Dana SDM Sarana dan Prasarana	Rp SDM Unit	134,188,000 114 3	123,303,485 114 3	91.89 100.00 100.00	
		Output	Pembinaan Wajib Pajak Terselenggaranya penyuluhan wajib pajak Terselenggaranya pemberian penghargaan pada WP	WP WP WP	1,000 2,250 100	1,452 2,250 100	145.2 100.00 100.00	
		Outcomes	Terbinanya wajib pajak Terselenggara penyuluhan wajib pajak Terselenggaranya pemberian penghargaan pada WP	WP WP WP	1,000 2,250 100	1,452 2,250 100	145.20 100.00 100.00	

BAB II

RENCANA STRATEGIS

A. VISI DAN MISI

1. VISI

Berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi dari Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta maka ditetapkan visi sebagai berikut :

“MENJADIKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH SEBAGAI PENGELOLA PAJAK DAERAH YANG EFEKTIF, BERKEADILAN DAN BERDASARKAN POTENSI EKONOMI “

2. MISI

Berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi dari Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta maka ditetapkan Misi sebagai berikut :

- MEWUJUDKAN KUALITAS MANAJEMEN KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH KOTA YOGYAKARTA
- MEWUJUDKAN KEBIJAKAN TEKNIS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
- MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA DALAM PEMBAYARAN PAJAK DAN PERIJINAN REKLAME
- MENINGKATKAN PENGAWASAN OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. TUJUAN

Tujuan yang hendak dicapai untuk mewujudkan visi Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta adalah :

- a. Mewujudkan pelayanan intern dalam mendukung pemungutan pajak
- b. Mewujudkan ketertiban dalam pemungutan pajak daerah
- c. Mewujudkan pajak menjadi andalan pendapatan daerah
- d. Mendorong berkembangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

2. SASARAN

- a. Terwujudnya pelayanan intern (umum, kepegawaian, keuangan) dari tahun ke tahun cepat, mudah, tepat waktu.
- b. Tersusunnya pedoman pemungutan Pajak Daerah :
 - Raperda tentang Pajak Daerah
 - Rancangan Keputusan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah tentang Pajak Daerah.
 - Sisdur pemungutan pajak daerah.
- c. Tercapainya target penerimaan Pajak Daerah dan Bagi Hasil PBB dan BPHTB
- d. Terlaksananya pengawasan obyek dan subyek pajak di Wilayah Kota Yogyakarta.

C. STRATEGI (CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN)

Cara mencapai tujuan dan sasaran ini meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta adalah :

1. KEBIJAKAN

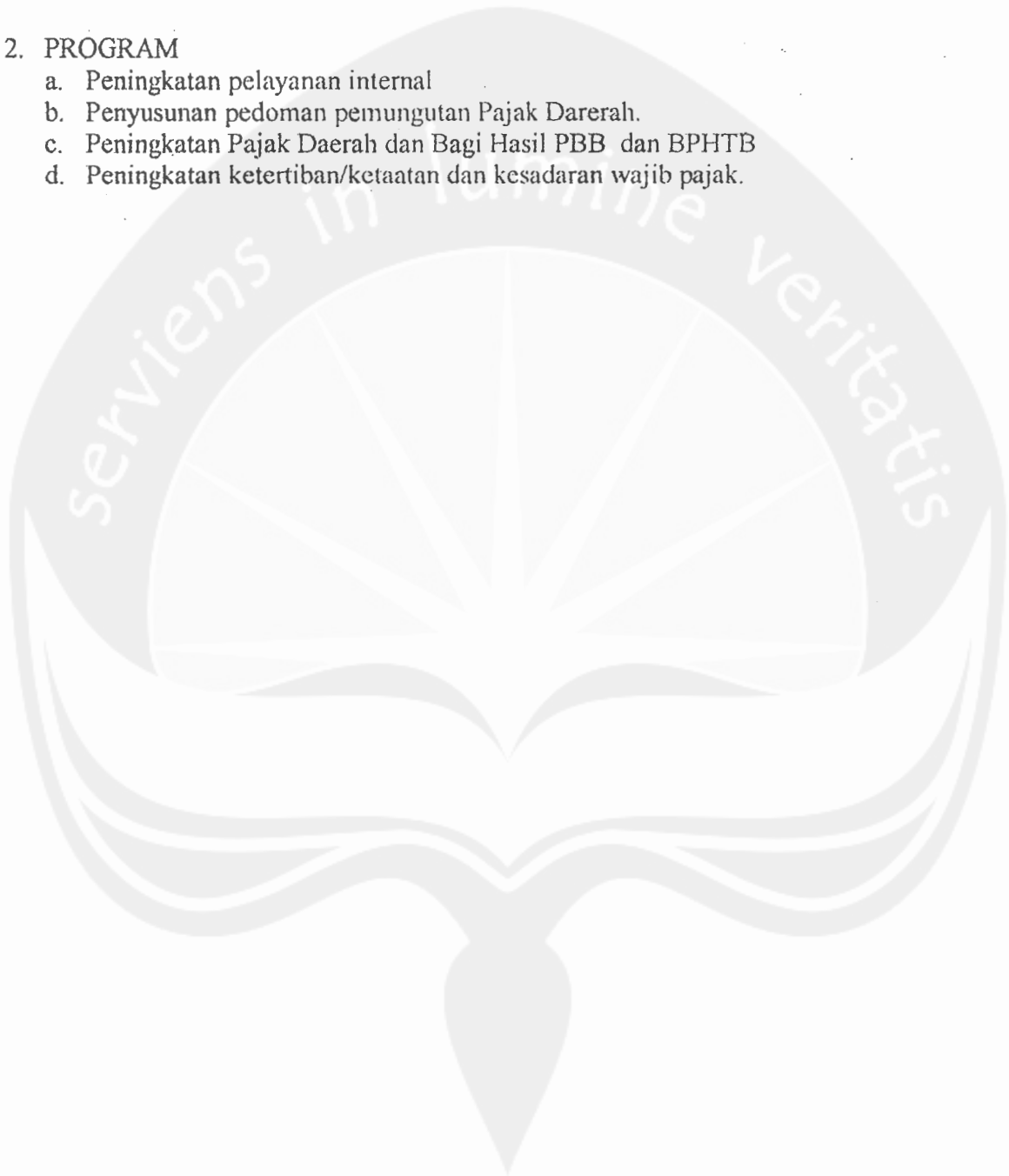
Kebijakan yang ditetapkan adalah :

- a. Pengaturan pemberian kesempatan PNS untuk pengembangan SDM dan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung tugas pemungutan pajak.

- b. Pengaturan mengenai pemungutan Pajak Daerah.
- c. Pengembangan pelayanan menuju pelayanan prima dalam pemungutan Pajak Daerah, Bagi Hasil PBB dan BPHTB
- d. Pengembangan Sistem Pengawasan yang bertumpu pada sumber daya kelembagaan lokal

2. PROGRAM

- a. Peningkatan pelayanan internal
- b. Penyusunan pedoman pemungutan Pajak Daerah.
- c. Peningkatan Pajak Daerah dan Bagi Hasil PBB dan BPHTB
- d. Peningkatan ketertiban/ketaatan dan kesadaran wajib pajak.



SASARAN	KEMUNDURAN	CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM	KEGIATAN
<p>1. Terwujudnya pelayanan intern dan tahun ke tahun (kepegawaian, keuangan dan umum) cepat, mudah, tepat waktu.</p>	<p>1. Pengukuran kemampuan SDM dan pendidikan sarana dan prasarana yang mendukung tugas pemungutan pajak.</p>	<p>1. Pelayanan intern kantor dalam rangka peningkatan kualitas manajemen dan aparat</p>	<p>1. Melaksanakan kegiatan umum (antara lain melaksanakan pengadaan barang)</p> <p>2. Menyelaraskan pelayanan kepegawaian.</p> <p>3. Menyelenggarakan pelayanan keuangan.</p> <p>4. Menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan</p>
<p>2. Tersusunnya pedoman pemungutan Pajak Daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raperda tentang Pajak Daerah. • Rancangan Keputusan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah. • Sistem pemungutan Pajak Daerah. 	<p>2. Pengukuran mengenai pemungutan Pajak Daerah.</p>	<p>3. Penyusunan pedoman Pemungutan Pajak Daerah.</p>	<p>1. Mengevaluasi materi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.</p> <p>2. Mengevaluasi materi Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.</p> <p>3. Mengevaluasi sistem dan prosedur pemungutan Pajak Daerah.</p>
<p>3. Tercapainya target penerimaan Pajak Daerah Bagi Hasil PBB dan BPHTB</p>	<p>1. Pengembangan pelayanan menuju pelayanan prima dalam pemungutan Pajak Daerah Bagi Hasil PBB dan BPHTB</p>	<p>1. Peningkatan Pajak Daerah dan Bagi Hasil PBB dan BPHTB</p>	<p>1. Mengoptimalkan penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir dan Pajak Penerangan Jalan</p> <p>2. Mengoptimalkan penerimaan PBB dan BPHTB.</p> <p>3. Melaksanakan proses peninjauan reklame.</p>
<p>4. Terlaksananya pengawasan pada obyek dan suyek pajak di Wilayah Kota Yogyakarta.</p>	<p>1. Penguasaan Sistem Pengawasan yang bertumpu pada sumber daya kelembagaan lokal.</p>	<p>1. Peningkatan kerentanan/keeraatan dan kesadaran wajib pajak.</p>	<p>1. Melaksanakan pemeriksaan wajib pajak lengkap</p> <p>2. Melaksanakan pemeriksaan wajib pajak sederhana</p> <p>3. Melaksanakan penertiban Reklame.</p> <p>4. Melaksanakan penyuluhan wajib pajak</p> <p>5. Melaksanakan pembinaan wajib pajak</p>



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH

Komp. Balaikota Jl. Kenari No.56 Yogyakarta 55165 Telp. 515865, 515866 Pswt 248,249
Langsung 562835

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 2183

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

N a m a : Femmy
Nomor Mahasiswa : 14423/EA
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
Alamat : Jl Babarsari No. 43 Yogyakarta

Telah mengadakan wawancara serta pengumpulan data dalam rangka penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta dengan judul " **Evaluasi Proses Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta** " mulai tanggal 2 Oktober s.d 15 Desember 2006.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Desember 2006

a.n. Kepala Kantor

Sub. Bagian Tata Usaha

